

Politeknik Caltex Riau

Empowers You To Global Competition

P-ISSN : 2085-0751 E-ISSN: 2476-9460

Volume 12 No.1, Mei 2019

Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis

Diterbitkan oleh :

Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Politeknik Caltex Riau

Editorial Team

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Meliza Putriyanti Zifi, S.E., M.Acc — Politeknik Caltex Riau

Editors

Hamdani Arifulsyah, S.E., M.Ak — Politeknik Caltex Riau

Fifitri Ali, S.S.T., M.Sc — Politeknik Caltex Riau

Adhitya Agri Putra, S.E., M.Acc., Ak., CA. — Universitas Riau

Atika Zarefar,S.E., M.Ak., Ak — Universitas Riau

Vidiyanna Rizal Putri, S.E., M.Si — STIE Indonesia Banking School

Layout Editor

Muhammad Mahrus, S.S.T — Politeknik Caltex Riau

Artikel

Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Perbankan

[illegible]

Viola Syukrina E Jannosi, Yuliadi Yuliadi

Read Statistic: 1017

Analisis Pengukuran Kinerja dengan Konsep Balance Scorecard pada PT Bank Mipsi Puri Persada

[illegible]

Elisa Sriviana, Sudi Nurulita, Heri Ribut Yullantoro

Read Statistic: 1012

Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Keuangan Terhadap Pendapatan Premi Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017

[illegible]

Heri Ribut Yullantoro, Yefhi Yefhi, Lovita Agreda

Read Statistic: 988

Penyusunan Laporan Simpan Pinjam Menggunakan Microsoft Access pada Koperasi Karyawan Politeknik Caltex Riau

[illegible]

Tulus Fahrurrodi Wibowo, Jolka Zarefar, Hamdani Jorifulayah

Read Statistic: 469

Social Capital and Financial Performance : The Mediating Role of Capital Structure

[illegible]

Siti Puryandani, Surya Kusuma Khalid Hidayatullah

Read Statistic: 439

Struktur Modal dan Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri

[illegible]

Diana Novitasari, Jolya Samudra Maharchika

Read Statistic: 795

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ETAP/SAK Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Pisang Small UMKM Pesisir Di Kecamatan Mutalayang Mamaki

[illegible]

Yuli Rawun, Gawald Natan Tumilaar

Read Statistic: 2811

Jurnal Politeknik Caltex Riau
https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/
| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

Determinasi Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Bpk

Destin Alfianika Maharani[1], Anastasia Anggarkusuma Arofah[2]
[1] Universitas Perwira Purbalingga, Jurusan Akuntansi, email: destinalfianika@unperba.ac.id
[2] Universitas Perwira Purbalingga, Jurusan Akuntansi, email: anastasia@unperba.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 1). Pengaruh ukuran pemerintah terhadap opini BPK 2). Pengaruh tingkat ketergantungan daerah kepada pusat terhadap opini BPK, 3) Pengaruh tingkat kemakmuran terhadap opini BPK, 4) Pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap opini BPK. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2017 hingga 2019. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode analisis purposive sampling dengan kriteria 1) kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah, 2) kota dan kabupaten yang menerbitkan laporan keuangan periode 2017 sampai dengan tahun 2019 dan 3) kota dan kabupaten yang menyampaikan informasi yang dibutuhkan penelitian secara lengkap. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 24. Secara parsial ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini BPK. Variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pusat dan tingkat kemakmuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit opini BPK. Sedangkan tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap opini BPK. Secara keseluruhan variable pada penelitian ini dapat mempengaruhi opini bpk sebanyak 55.2%.
***Kata Kunci**: opini BPK, ukuran, tingkat ketergantungan daerah kepada pusat, tingkat kemakmuran, tingkat kemandirian daerah*

Abstract

The research objectives were to determine: 1). Effect of government size on BPK opinion 2). The influence of the level of regional dependence on the center on the BPK opinion, 3) The influence of the level of prosperity on the BPK opinion, 4) The influence of the level of regional independence on the BPK opinion. The population in this study were districts and cities in Central Java Province for the period 2017 to 2019. The samples in this study used purposive sampling analysis method with the criteria of 1) cities and regencies in Central Java, 2) cities and regencies that published financial reports for the period. 2017 to 2019 and 3) cities and districts that convey the information required for complete research. The test tool used in this study used SPSS version 24. Partially, the size of local government has a negative and significant effect on BPK's opinion. The variables of the level of regional dependence on the central government and the level of prosperity have a positive and significant effect on BPK's audit opinion. Meanwhile, the level of regional dependence has a negative and insignificant effect on BPK's opinion. Overall, the variables in this study can influence your opinion as much as 55.2%.
***Keywords**: BPK opinion, size, the level of regional dependence on the center, level of prosperity, level of regional independence*

Dokumen diterima pada Selasa 9 Maret, 2021
Dipublikasikan pada Senin 31 Mei, 2021

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [1]. Masyarakat memberikan kewenangan terkait pengelolaan keuangan dan asset daerah kepada pemerintah daerah dengan harapan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan pengelolaan keuangan daerah serta aset daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel [2].

Dalam pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh pihak yang independen. Hal tersebut dilaksanakan agar pengelolaan keuangan negara berjalan dengan efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab. Pemeriksaan laporan keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mandiri dan bebas. Setelah melaksanakan pemeriksaan BPK akan menyusun laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan [3].

BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan mengeluarkan empat macam opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dalam laporan audit laporan keuangan pemerintah daerah. Opini yang diberikan oleh auditor akan memberikan pengaruh penting terhadap stakeholder dan dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengurangi tingkat asymestri informasi yang sering terjadi antara principal dan agent karena dapat menentukan kualitas informasi yang tercantum pada laporan keuangan yang diaudit [4].

Faktor – faktor yang mempengaruhi pemberian opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus diperhatikan oleh masing – masing pemerintah daerah. Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang dipercaya dan diberikan wewenang oleh *stakeholder* untuk menjalankan pemerintahan di suatu daerah. Peran dan komitmen dari kepala daerah sangat penting dalam rangka upaya daerah dalam meraih opini audit wajar tanpa pengecualian dari BPK [3].

Pada tahun 2019, opini BPK atas LKPD terus meningkat. Adapun peningkatan opini WTP pada pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi, meningkat dari 0% (0 LKPD) pada tahun 2006 menjadi 94% (32 LKPD) pada tahun 2018. Kemudian Pemerintah Kabupaten, opini WTP meningkat dari 0,58% (2 LKPD) pada tahun 2006 menjadi 79% (327 LKPD) pada tahun 2018. Dan Pemerintah Kota, opini WTP meningkat dari 1% (1 LKPD) pada tahun 2006 menjadi 90% (84 LKPD) pada tahun 2018 [5].

Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK juga termasuk dalam perbaikan pada bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, pinjaman pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [6]. Berdasarkan hasil pemantuan dari BPK atas tindak lanjut hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berulang dan belum terselesaikan. Sehingga, BPK memberikan pendapat kepada pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikannya dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi perbaikan di bidang pengelolaan aset, pendapatan dan belanja, serta pelayanan masyarakat.

Namun, ketika ditelisik lebih jauh lagi, pada dasarnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan perhatian khusus dari pemerintah setempat akibat lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang mengerti dan paham mengenai akuntansi. Selain itu, sering kali adanya kepentingan politik legislatif dan eksekutif dalam penggunaan anggaran yang cenderung menabrak aturan. Atas semua itu laporan keuangan harus tetap disajikan secara akuntabel. Ini bukan hal yang mudah [7]. Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dilakukan antara

Dokumen diterima pada Selasa 9 Maret, 2021
Dipublikasikan pada Senin 31 Mei, 2021

lain pemuktahiran data aset tetap, inventaris ulang aset tetap tanah, gedung, bangunan, serta penyetoran dan pemulihan nilai pertanggungjawaban belanja barang dan jasa ke kas daerah.

Adanya beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan opini BPK, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan karakteristik daerah terhadap opini BPK. Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik pemerintah terhadap opini BPK pada LKPD telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh [8] mengungkapkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap opini audit BPK, sedangkan belanja pemerintah daerah dan waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap opini audit BPK. Penelitian yang dilakukan oleh [3] mengungkapkan ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, tindak lanjut temuan audit, dan masa kerja kepala daerah memiliki pengaruh positif terhadap opini audit, sedangkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dan realisasi belanja pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [9] menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dimana jika opini audit yang diperoleh oleh pemerintah daerah baik maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah itu sendiri. Hal ini dapat diartikan bahwa opini audit menjadi salah satu dasar dalam menilai kemampuan kinerja keuangan suatu daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan subjek penelitian pada Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan nilai pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah fluktuatif dan terdapat kabupaten paling miskin di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut membuat peneliti tertarik dan penting untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap opini BPK di Provinsi Jawa Tengah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan agency teory. Teori ini mengungkapkan hubungan keagenan adalah kontrak antara *agent* dengan *principal* untuk memberikan jasa serta memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. *Principal* memberikan tanggung jawabnya kepada *agent* untuk melaksanakan tugas dalam entitas demi kepentingan *principal*. Sedangkan *agent* sebagai pihak pengelola investasi yang berasal dari *principal* bertanggung jawab untuk memperoleh laba yang diinginkan oleh *principal*. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* [10].

Pada sektor publik khususnya pada pemerintahan sadar atau tidak, teori keagenan telah diterapkan, dimana adanya otonomi dan desentralisasi daerah. Pada hakikatnya, tujuan adanya organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas barang atau sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak [11]

Pemerintahan pusat dalam pengelolaan dan mengalokasikan dana dapat dibantu dengan adanya penerapan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat. Penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah disini telah menimbulkan suatu teori keagenan antara pihak legislatif dan masyarakat serta antara legislatif dan eksekutif. Permasalahan ini pada akhirnya akan menimbulkan adanya penyimpangan anggaran yang disusun oleh pihak legislatif, sehingga anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumberdaya kepada masyarakat namun untuk kepentingan pihak legislatif. Teori keagenan ini banyak memberikan dampak negatif yang berupa perilaku. Perilaku tersebut tidak lepas dari asimetri informasi. Pihak agen memiliki informasi keuangan yang lebih banyak daripada pihak prinsipal. Di sisi lain, pihak prinsipal pun dapat menggunakan kewenangannya/kekuasaanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah suatu bentuk dari representasi data keuangan termasuk catatan keuangan yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu entitas pemerintah pada waktu tertentu atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban dalam suatu periode tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk memenuhi

Dokumen diterima pada Selasa 9 Maret, 2021
Dipublikasikan pada Senin 31 Mei, 2021

kepentingan pemakai, maka pemerintah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk kepentingan umum.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca). Laporan keuangan tersebut merupakan bagian penting untuk membentuk akuntabilitas sektor publik dan indikator kinerja keuangan pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, LKPD memuat informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk evaluasi kinerja (Surepno, 2013).

2.3 Opini Audit

Opini yang tercantum dalam laporan audit merupakan salah satu hal penting dalam proses audit karena opini tersebut mencantumkan informasi utama yang akan diberikan kepada pemakai informasi tentang yang dilakukan auditor dan kesimpulannya. Pendapat auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu [12] :

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian
   Pendapat ini terjadi tidak adanya batasan bagi auditor dalam ruang lingkup audit dan tidak ada pengecualian pada batas wajar dan penerapan standar akuntansi keuangan di laporan keuangan dan pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas
   Auditor akan memberikan opini apabila terdapat kondisi tertentu, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian
   Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu :
   a. Klien membatasi ruang lingkup audit
   b. Kondisi-kondisi yang ada diluar kekuasaan klien ataupun auditor menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting
   c. Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan
   d. Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan
4. Pendapat tidak wajar
   Pendapat ini menitikberatkan apabila laporan keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat
   Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas objek audit, maka laporan ini disebut laporan tanpa pendapat *(adverse opinion)*. Hal ini karena beberapa kondisi, yaitu adanya batasan khusus di lingkungan audit, kemudian karena auditor tidak independen dalam hubungan dengan kliennya.

2.4 Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik pemerintah daerah mengacu pada sifat khas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Unsur – unsur pada laporan keuangan pemerintah daerah dapat menggambarkan karakteristik pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas publik untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai kegiatan operasionalnya, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos di laporan keuangan [13]

2.5 Hipotesis

H_1= Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap opini BPK
H_2 = Tingkat ketergantungan daerah kepada pusat berpengaruh negatif terhadap opini BPK
H_3 = Tingkat kemakmuran berpengaruh terhadap positif opini BPK
H_4 = Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap opini BPK

Dokumen diterima pada Selasa 9 Maret, 2021
Dipublikasikan pada Senin 31 Mei, 2021

2.6 Kerangka Pemikiran

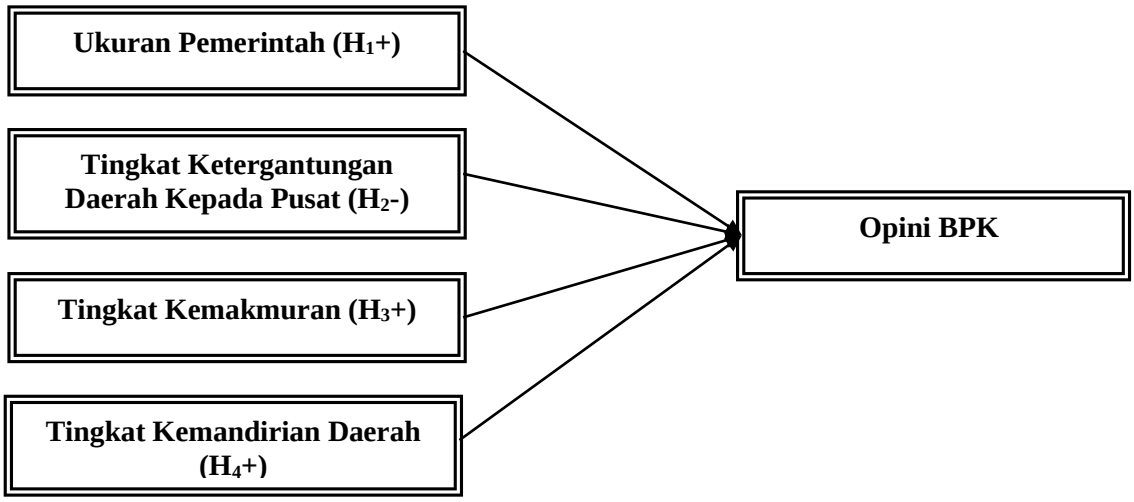

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODOLOGI PENELITIAN

Objek pada penelitian ini adalah seluruh kota dan kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) yang terdiri dari laporan keuangan realisasi anggaran, neraca dan laporan opini audit BPK. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria: 1) kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah, 2) kota dan kabupaten yang menerbitkan laporan keuangan periode 2017 sampai dengan tahun 2019 dan 3) kota dan kabupaten yang menyampaikan informasi yang dibutuhkan penelitian secara lengkap.

3.1 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan dependen. Variable dependen pada penelitian ini merupakan opini laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK. Sedangkan, variabel independen pada penelitian ini yaitu ukuran pemerintahan, tingkat ketergantungan daerah kepada pusat, tingkat kemakmuran dan tingkat kemandirian pemerintah daerah. Berikut ini merupakan variabel operasional pada penelitian ini yaitu:

3.1.1 Opini BPK

Opini BPK adalah opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada penelitian ini, opini BPK diukur dengan menggunakan empat kategori yaitu :

1 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2 = Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3 = Opini Tidak Wajar
4 = Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

3.1.2 Ukuran Pemerintah

Ukuran dari pemerintah daerah yang diukur melalui nilai total aset. Rumus untuk mengukur ukuran pemerintah yaitu:

$$Size = Ln\ Total\ Aset$$

Dokumen diterima pada Selasa 9 Maret, 2021
Dipublikasikan pada Senin 31 Mei, 2021

3.1.3 Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pusat

Tingkat ketergantungan daerah kepada pusat adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai semua aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi dari pendapatan asli daerah. Tingkat ketergantungan daerah kepada pusat dapat diukur dengan :

$$TKDKP \frac{Dana\ Alokasi\ Umum}{Total\ Pendapatan}$$

3.1.4 Tingkat Kemakmuran

Tingkat kemakmuran pemerintah daerah yang diukur melalui nilai pendapatan asli daerah yang dikemudian di logaritma natural. Rumus untuk tingkat kemakmuran yaitu :

$$TK = Ln\ Total\ PAD$$

3.1.5 Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat kemandirian daerah dapat diukur dengan:

$$TKD \frac{Total\ PAD}{Total\ Pendapatan}$$

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan uji regresi logistik. Regresi logistic digunakan untuk menguji hubungan lebih dari satu variable independent ke variable dependen yang datanya menggunakan variable dummy. Pengujian pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 24.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

Statistik deskriptif adalah analisis data yang menyajikan data berupa nilai minimum, maksimum, rata dan standar deviasi. Selain itu, pada statistik deskriptif juga menyajikan data yang paling banyak untuk variable dependennya. Hasil olah data statistik deskriptif yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Statitik Deskriptif Variabel Independen

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE	71	28.16	31.03	28.9791	.43994
TKDKP	71	30.03	57.54	45.5106	3.68007
TK	71	25.91	28.21	26.5908	.35962
TKD	71	10.57	45.20	17.8888	5.61854
Valid N (listwise)	71				

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 71 perusahaan. Hasil pengujian variabel ukuran pemerintah daerah memperoleh nilai minimum 28.16 dan nilai maksimal 31.03. Sedangkan, nilai rata – rata 28.9791 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.43994. Hasil pengujian variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pusat memperoleh nilai minimum 30.03 dan nilai maksimal 57.54. Sedangkan, nilai rata – rata 45.5106 dengan nilai standar deviasi sebesar 3.68007.

Hasil pengujian variabel ukuran pemerintah daerah memperoleh nilai minimum 28.16 dan nilai maksimal 31.03. Sedangkan, nilai rata – rata 28.9791 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.43994. Hasil pengujian variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pusat memperoleh nilai minimum 30.03 dan nilai maksimal 57.54. Sedangkan, nilai rata – rata 45.5106 dengan nilai standar deviasi sebesar 3.68007.

Dokumen diterima pada Selasa 9 Maret, 2021
Dipublikasikan pada Senin 31 Mei, 2021

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Dependen

	Observed		Predicted		
			OPINI_AUDIT		Percentage Correct
			1		
Step 0	OPINI_AUDIT	1	67	0	100.0
		2	4	0	.0
	Overall Percentage				94.4

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel 2 dapat diperoleh opini auditor mempunyai nilai predicted untuk yaitu pada angka 1 sebanyak 67 dan angka 2 sebanyak 4. Hasil ini, menunjukkan bahwa observasi pada penelitian ini lebih banyak opini BPK denga wajar tanpa pengecualian. Pada penelitian ini data penelitian yang diperoleh hanya terdiri dari wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP). Tidak ditemukan data opini BPK dengan kategori opini tidak wajar dan tidak memberikan pendapat (TMP)

4.2 Uji Kebaikan Model

Tabel 3. Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	15.259[a]	.196	.558

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel 3, Nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0.558 dan *Cox & Snell R Square* 0.196. Hal ini menunjukkan bahwa 45.8% hasil penelitian ini masih dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipengaruhi oleh variabel ain diluar variabel pada penelitian ini.

4.3 Uji Regresi Logistik

Regresi logistik digunakan untuk menguji hubungan lebih dari satu variabel independen ke variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini menggunakan data kategorik. Hasil pengujian regresi logistik pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4. Uji Regresi Logistik

		B	S.E.	Wald	df	Sig.
Step 1[a]	SIZE	-20.058	9.687	4.288	1	.038
	TKDKP	.844	.381	4.903	1	.027
	TK	27.497	13.045	4.443	1	.035
	TKD	-1.782	.976	3.332	1	.068
	Constant	-168.882	120.093	1.978	1	.160

Sumber : Data yang diolah

Opini BPK = -168.882– 20.058 SIZE + 0.844 TKDKP + 27.497 TK – 1.782 TKD

4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian hipotesis dapat menunjukkan seberapa besar pengaruh antara variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujian hipotesis ini dapat dilihat pada tabel 4.

4.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Opini BPK

Berdasarkan *teori agency*, ukuran pemerintah daerah yang besar mengidentifikasi pengelolaan keuangan yang lebih kompleks karena dapat menyangkut informasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar mengurangi asimetri informasi antara pemerintah

Dokumen diterima pada Selasa 9 Maret, 2021
Dipublikasikan pada Senin 31 Mei, 2021

daerah dan masyarakat. Selain itu opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD juga dapat mengurangi adanya asimetri tersebut.

Hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap opini BPK. Artinya semakin tinggi ukuran pemerintah akan berpengaruh ke menurunkan opini yang akan diberikan oleh BPK. variabel ukuran pemerintah pada penelitian ini memiliki koefisien -20.058 dengan nilai signifikansi sebesar 0.038. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini BPK. Sehingga, hipotesis pada penelitian ini **ditolak.**

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [3], [8] dan [14]. Hal ini dikarenakan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah secara penuh belum memiliki sistem manajemen yang baik. Sehingga, walaupun pemerintah daerah memiliki asset yang besar namun dibarengi dengan adanya manajemen pengelolaan yang kurang baik akan menimbulkan ketidak efektifan dan efisiensi terhadap pengelolaan asset dan dapat menimbulkan kurang baiknya opini yang diberikan BPK atas LKPD.

4.4.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pusat terhadap Opini BPK

Hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu tingkat ketergantungan daerah kepada pusat berpengaruh negatif terhadap opini BPK. Artinya semakin tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan berpengaruh ke menurunnya kemungkinan pemberian opini BPK. Variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pusat pada penelitian ini memiliki koefisien sebesar 0.844 dengan nilai signifikansi sebesar 0.027. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah kepada pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini BPK. Sehingga, hipotesis pada penelitian ini **ditolak.**

Hasil penelitian mengidentifikasikan adanya pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pemberian dana yang berasal dari pemerintah pusat yang kecil dapat mempermudah pemerintah daerah untuk mengelola, bertanggungjawab dan pengawasan. Hal ini disebabkan adanya kepentingan bagi pemerintah pusat untuk memantau apa yang dilakukan pemerintah daerah dan tingkat pencapaian kinerja atas alokasi dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat Sehingga kemungkinan untuk mendapatkan opini BPK yang baik pada LKPD menjadi besar.

4.4.3 Pengaruh Tingkat Kemakmuran terhadap Opini BPK

Berdasarkan *teori agency,* tingkat kemakmuran pada kabupaten/ kota yang dapat dilihat dengan besarnya asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menimbulkan besarnya tekanan untuk meyampaikan informasi serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tekanan tersebut dapat diminimalisir dengan adanya opini yang diberikan oleh BPK.

Hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu tingkat kemakmuran berpengaruh positif terhadap opini BPK. Artinya semakin tinggi tingkat kemakmuran pemerintah daerah akan meningkatkan opini BPK pada LKPD. Variabel tingkat kemakmuran pada penelitian ini memiliki koefisien sebesar 27.497 dengan nilai signifikansi sebesar 0.035. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini BPK. Sehingga, hipotesis pada penelitian ini **diterima.**

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [3]. Penelitian tersebut mengungkapkan dengan besarnya pendapatan asli daerah dapat menjadi cerminan beesarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelolanya. Pemerintah daerah harus mengungkapkan laporan pertanggung jawaban terkait penggunaan dana yang berasal dari pemerintah pusat dan harus mengungkapkan pendapatan asli daerah oleh para *stakeholder* khususnya penyumbang pendapatan.

4.4.4 Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Opini BPK

Variabel kemadirian daerah pada dasarnya terkait dengan PAD, sehingga semakin besar PAD yang dimiliki oleh kabupaten/ kota maka akan semakin besar kemampuan kabupaten/ kota untuk menjalankan otonomi daerahnya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Dokumen diterima pada Selasa 9 Maret, 2021
Dipublikasikan pada Senin 31 Mei, 2021

Selain itu, semakin besar PAD yang dimiliki akan meningkatkan kemampuan daerah untuk pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam LKPD. Adanya pengungkapan LKPD tersebut diharapkan mampu mengurangi adanya asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positf terhadap opini BPK. Artinya semakin tinggi tingkat kemandirian pemerintah daerah akan meningkatkan opini yang akan diberikan oleh BPK yang tercantum pada LKPD. Namun variabel tingkat kemandirian daerah pada penelitian ini memiliki koefisien sebesar -1.782 dengan nilai signifikansi sebesar 0.068. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap opini BPK. Sehingga, hipotesis pada penelitian ini **ditolak.**

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [15]. Dimana masyarakat memiliki partisipasi dan peran yang aktif dalam upaya pembangunan daerah, diharapkan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas dana yang diperoleh dari masyarakat, misalnya berasal dari pajak dan retribusi. Bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dapat tercermin pada laporan keuangan daerah yang berasas transparan, akuntabilitas, keadilan. Sehingga, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, maka pemerintah daerah akan cenderung berusaha meningkatkan opini BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang pada penelitian ini yaitu :

1) Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini BPK
2) Tingkat ketergantungan daerah kepada pusat berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini BPK
3) Tingkat kemakmuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini BPK
4) Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap opini BPK

5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1) Menambahkan sampel kabupaten agar diperoleh hasil yang lebih relevan
2) Menambahkan tahun penelitian
3) Menambahkan variabel lain, yang diduga mempengaruhi opini BPK pada LKPD

DAFTAR PUSTAKA

[1] _____.(2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

[2] Grace, Djara Wilhelmina *et al*.,. (2013). Kualitas Audit Inspektorat dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

[3] Pratiwi, R., & Aryani, Y. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 167-189.

[4] Chang, X., Dasgupta, S., & Hilary, G. (2009). The effect of auditor quality on financing decisions. The Accounting Review, 84(4), 1085-1117.

[5] __(2019). Ketua BPK Apresiasi Peningkatan Kualitas LKPD. www.bpk.go.id

[6] _____.(2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

[7] Gutomo, Kotot. (0000). Berburu Opini WTP. www.bpkp.go.id

[8] Rosadi, Samsul Rosadi dan Antin Okfitasari. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Opini Audit BPK. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*

[9] Kurnia, Riki dan Fefri Indra Arza. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP Dengan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Non WTP (Studi Empiris pada Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*

Dokumen diterima pada Selasa 9 Maret, 2021
Dipublikasikan pada Senin 31 Mei, 2021

[10] Jensen, M., C., dan W. Meckling, (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure, *Journal of Finance Economic* 3:305- 360
[11] Minarsih, Ratna Ayu. (2015). Pengaruh Size, Wealth, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
[12] Arens, Alvin. A, Randal J. Elder, Mark S. (2015). Auditing and Assurance service. Edisi keduabelas. Jilid Satu. Jakarta: Erlangga. Prentice Hall International. New York.
[13] Lesmana, Sigit Indra. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. *Tesis*. FE UNS. Surakarta
[14] Kusumawati, Dwi dan Dwi Ratmono. (2017). Determinan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting*
[15] Hamidayanti, Luthfina dan Marita Kusuma Wardani. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*

Dokumen diterima pada Selasa 9 Maret, 2021
Dipublikasikan pada Senin 31 Mei, 2021